

**Pendampingan Masyarakat Desa Melalui Penyusunan Rencana
Kerja Desa Membangun**

Lanto Ningrayati Amali¹, Sitti Suhada², Muhammad Rifai Katili³

^{1,2,3}Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia
email: ningrayati_amali@ung.ac.id, sittisuhada@ung.ac.id, mrifaikatili@ung.ac.id

Abstract

The goal to be achieved in the thematic KKN activities in developing rural is to increase the initiative, awareness, and participation of rural communities in participatory rural development. The specific targets to be achieved are: (1) optimizing the performance of the rural government and increasing the capacity of the rural community in the rural development process, and (2) making the village government more effective in achieving rural development. To achieve these specific goals and targets, the method used is the transfer of knowledge and technology through the implementation of mentoring and socialization in encouraging community initiatives and participation in rural development.

Keywords: Rural build; community participation; community assistance

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan KKN tematik desa membangun adalah meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif. Target khusus yang ingin dicapai adalah (1) mengoptimalkan kinerja pemerintahan desa dan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, dan (2) mengefektifkan pemerintahan desa dalam mencapai pembangunan desa. Untuk mencapai tujuan dan target khusus ini metode yang digunakan adalah dengan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan pendampingan dan sosialisasi dalam mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Kata Kunci: Desa membangun; partisipasi masyarakat; pendampingan masyarakat

© 2021 Lanto Ningrayati Amali, Sitti Suhada, Muhammad Rifai Katili

Under the license CC BY-SA 4.0

Correspondence author: Lanto Ningrayati Amali, ningrayati_amali@ung.ac.id, Gorontalo, Indonesia

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia dalam undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Dalam UU ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa dalam merespon proses modernisasi, globalisasi, dan demokratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya (Susanti, 2017).

Salah satu agenda nawacita dalam implementasi UU No. 6 Tahun 2014 adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Untuk mencapai pembangunan desa, setiap desa mendapatkan pendampingan dalam bentuk sumber daya manusia. Dan hal ini tertuang dalam peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, kerja sama, pengembangan badan usaha milik desa, dan pembangunan di tingkat desa. Oleh karena itu menurut Rambe dkk (2020), tugas yang dimiliki pendamping lokal desa dapat dipahami konsep pembangunan desa yang ditempuh pemerintah Indonesia memfokuskan percepatan pembangunan desa.

Untuk memahami konsep pembangunan desa, pemerintah membutuhkan peran serta keterlibatan perguruan tinggi (PT) sebagai tulang punggung yang menjembatani program percepatan pembangunan desa melalui kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) tematik

desa membangun. Dimana pemerintah dan PT dapat berkolaborasi bersama, menjawab berbagai macam tantangan dan permasalahan desa, dan untuk itu diperlukan para akademisi ataupun profesional yang mempunyai pengetahuan ataupun kemampuan melalui berbagai program pelatihan, pembimbingan dan pendampingan masyarakat desa. Berlokasi di Desa Juria Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo, KKN tematik desa membangun dilaksanakan, dimana permasalahan di Desa ini adalah masih rendahnya peran serta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa serta pelestarian hasil-hasil pembangunan. Menurut Rambe dkk (2020) peran masyarakat desa kebanyakan hanya sebagai objek atau sasaran pembangunan tanpa keterlibatan peran masyarakat desa, olehnya partisipasi yang ada masih sebatas pada output atau pemanfaatan hasil. Disisi lain banyak potensi alam di desa yang masih belum terkelola secara baik, disebabkan oleh ketidakmampuan penguasaan teknologi, pendidikan masyarakat yang relatif rendah serta kecenderungan sifat penduduk desa yang menerima kondisi apa adanya. Olehnya pendampingan masyarakat melalui penyusunan rencana kerja desa menjadi strategis dalam mendorong prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam mewujudkan desa mandiri dan mampu berperan aktif dalam pembangunan desa.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat menggunakan metode pelatihan dan pendampingan berbasis *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Menurut Gitosaputro (2006), Chandra (2014) dan

Chambers (1994) bahwa PRA adalah suatu metode pendekatan, sikap dan perilaku yang memungkinkan dan memberdayakan orang untuk berbagi, menganalisis dan meningkatkan pengetahuan tentang kehidupan dan kondisi, dan untuk merencanakan, bertindak, memantau, mengevaluasi serta merefleksikannya.

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian keadaan/kondisi desa melalui diskusi, wawancara dan observasi lapangan guna menemukan permasalahan dan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat sasaran.
2. Melakukan pengenalan dan sosialisasi yang berkaitan dengan desa membangun. Sosialisasi ini menghadirkan pemerintah, aparat, dan masyarakat desa.
3. Melakukan pelatihan dan pendampingan penyusunan rencana kerja desa. Kegiatan ini berupa pendampingan perencanaan pembangunan desa; pendampingan pelaksanaan evaluasi pembangunan desa; kegiatan upaya inisiasi meningkatkan kehidupan masyarakat desa dan, kegiatan pendokumentasian pengetahuan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi serta konsultasi bagi masyarakat, berupa tindak lanjut dari hasil sosialisasi, pelatihan dan pendampingan yang telah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Program pengabdian masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan penyusunan rencana kerja desa mendapatkan respon yang sangat baik dan positif dari masyarakat dan aparat desa Juriya. Kegiatan ini, bagi masyarakat desa sangat

bermanfaat. Masyarakat sangat diberdayakan melalui kegiatan yang sifatnya positif dalam membangun menggali sumber-sumber daya yang dimiliki desa dalam mewujudkan desa mandiri. Selain itu rencana jangka panjang dari program ini adalah sinergisitas antara lembaga/institusi pendidikan dengan pemerintah desa, untuk terus menerus mengawal proses partisipasi masyarakat dalam membangun desanya, sehingga dapat memberikan nilai tambah dari segi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pendampingan masyarakat sesuai dengan tahapan pertama adalah mengadakan perkenalan serta sosialisasi KKN desa membangun yang dilanjutkan dengan melakukan kajian keadaan/kondisi desa melalui diskusi, wawancara dan observasi lapangan ke pemerintahan desa dan masyarakat desa Juri Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo (Gambar 1). Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan dan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat sasaran. Beberapa informasi yang diperoleh antara lain data awal untuk penyusunan/revisi/pengembangan RKP desa serta identifikasi potensi ekonomi desa.

Dalam penentuan program kerja Desa Juriya, mahasiswa KKN telah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah tentang program desa. Dimana program kerja yang diambil disesuaikan dengan program desa yang telah terampung ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes).



Gambar 1. Pengkajian keadaan desa

Kemudian program kerja mahasiswa KKN di sesuaikan pada bidang-bidang yang ada dalam RPJMdes tersebut. Penyusunan program kerja disesuaikan dengan RPJMdes yang telah rampung. Setelah penyusunan program kerja dilanjutkan dengan pemaparan program kerja untuk memperkenalkan program utama dari KKN Desa Membangun (Gambar 2).



Gambar 2. Penyusunan dan pemaparan program kerja

Selanjutnya tahapan pendampingan penyusunan rencana kerja desa (Gambar 3). Pendampingan ini lebih ditekankan pada beberapa bidang yaitu Bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana alam.



Gambar 3. Pendampingan penyusunan rencana kerja

Tahap akhir kegiatan ini adalah monitoring serta evaluasi program untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan dari kegiatan pendampingan yang dilakukan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pemaparan keseluruhan program kerja yang telah dilaksanakan selama pendampingan kepada pemerintah desa seluruh masyarakat Desa Juriya (Gambar 4).



Gambar 4. Kegiatan monitoring dan evaluasi program

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan KKN, program dan agenda kegiatan yang di rencanakan terlaksana dengan baik berkat bantuan serta dukungan dari masyarakat serta pihak pemerintah desa. Secara keseluruhan program yang direncanakan dapat terealisasi dengan optimal walaupun terdapat beberapa kendala. Pendampingan yang diberikan kepada masyarakat pada dasarnya mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat desa Juriya yang memiliki pengetahuan dan jiwa keterampilan dalam pemanfaatan potensi desa. Di sisi lain, mahasiswa dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab sebagai *agen of change* dengan kehadirannya, yang dapat memberikan solusi serta saran dalam permasalahan yang ada pada kehidupan masyarakat maupun pemerintah desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM), Universitas Negeri Gorontalo atas dukungan dana pengabdian PNBP BLU tahun 2021.

REFERENSI

- Chandra, Ganesh. 2014. "*Participatory Rural Appraisal*". *Issues and Tools for Social Science Research in Inland Fisheries*. Central Inland Fisheries Research Institute. Bulletin 163: 286-302.
- Chambers, R. 1994. "*The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal*." *World Development*. 22(7): 953-69.
- DP2M Dikti. *Panduan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat*. Jakarta: DIKTI; 2020.

- Gitosaputro S. 2006. *“Implementasi Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam Pemberdayaan Masyarakat”*. Komunitas; Jurnal pengembangan masyarakat Islam. 2(1).
- LPPM UNG. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. Gorontalo: LPPM; 2020.
- Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2014.
- Peraturan Menteri Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Permen Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; 2015.
- Rambe, J. Y., Badaruddin., dan Abdul Kadir. 2020. *“Konsep Pendampingan dalam Struktur Pemerintahan Indonesia: Mengapa Pendamping Lokal Desa Harus Ada?”*. Perspektif, 9 (2): 263-269.
- Susanti, M. H. 2017. *“Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal”*. Integralistik. No.1/Th. XXVIII/201: 29-39.